**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN**

Khaerun Nisa

NPP. 29.0733

*Asdaf Kabupaten Serang, Provinsi Banten*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.0733@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT (in english)**

Serang Regency is one of the regencies in Banten Province, where the number of productive age population from year to year always increases and the number of unemployed is always included in the three regencies that have the highest number of unemployed in Banten Province, this results in high competition in job search. Even though the number of large and medium industries is quite large, it should be able to attract workers and reduce the number of existing unemployed. This encourages the need for the Serang Regency Government in implementing the implementation of employment that can overcome the existing unemployment. This research aims to determine the implementation of local regulations in tackling unemployment in Serang Regency. The research design used is qualitative research with descriptive methods and deductive approaches. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. This research uses the theory of Van Metter and Van Horn which are seen from six indicators, namely standards and policy objectives, resources, communication between organizations, attitudes of implementers, economic, social and political environment. The results of this study concluded that the implementation of local regulations regarding the implementation of employment in tackling unemployment in Serang Regency has been going quite well, but the results have not been effective. The Perda focuses on the delivery of information on job vacancies and placement of workers to companies or industries spread across the Serang Regency area and if there are violations, there will be sanctions such as criminal acts, fines or administrative sanctions. While the inhibiting factors for the implementation of the regulation are the lack of a number of labor inspectors, inadequate, inadequate budget for training, unequal number of job opportunities, information about job vacancies that are difficult to identify, and the lack of awareness from each implementer to be able to realize good labor administration. so as to reduce the number of unemployed in Serang Regency.

**Keywords:** Implementation, Employment, Unemployment

**ABSTRAK (in bahasa)**

Kabupaten Serang merupakan satah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Banten, yang mana jumlah penduduk usia produktifnya dari tahun ke tahun selalu meningkat dan jumlah penganggurannya pun selalu termasuk kedalam tiga Kabupaten yang memiliki jumlah pengangguran tertinggi di Provinsi Banten, hal ini mengakibatkan tingginya persaingan dalam pencarian pekerjaan. Padahal jumlah industri besar dan sedang cukup banyak, seharusnya dapat menarik tenaga kerja dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Hal ini mendorong perlunya Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengimplementasikan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang dapat menanggulangi jumlah pengangguran yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Serang. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang dilihat dari enam indikator yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implemantasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Serang sudah berjalan cukup baik, akan tetapi hasilnya belum efektif. Perda tersebut menitikberatkan pada penyampaian informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja kepada perusahaan atau industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Serang dan apabila ada yang melanggar maka terdapat sanksi yaoti tindak pidana, denda ataupun sanksi administrative. Sedangkan faktor penghambat impelantasi perda tersebut adalah kurangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, belum memadai, belum memadai jumlah anggaran untuk pelatihan, tidak meratanya jumlah lapangan pekerjaan, informasi tentang lowongan pekerjaan yang sulit diketahui, dan belum adanya kesadaran dari setiap implementor untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang baik sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Serang.

**Kata Kunci**: Implementasi, Ketenagakerjaan, Pengangguran.

1. **PENDAHULUAN** 
   1. **Latar Belakang**

Pemerintahan berperan penting dalam proses pembangunan nasional. Adapun fungsi dari pemerintahan adalah pengaturan *(regulation),* pelayanan *(public service),* pemberdayaan *(empowering),* dan pembangunan *(development).[[1]](#footnote-1)* Pelaksanaan fungsi pengaturan dalam segala bentuknya bertujuan sebagai upaya untuk membentuk kondisi yang tepat sehingga kondusif untuk berbagai kegiatan, termasuk penciptaan tatanan sosial yang baik dalam berbagai kehidupan publik. Fungsi pelayanan diharapkan mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan oleh pemerintah, serta batasan-batasan yang dimiliki, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri.[[2]](#footnote-2)

Pemajuan tenaga kerja adalah bagian dari pembangunan nasional, yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk menjadi masyarakat yang makmur, adil dan makmur didukung Pancasila dan UUD 1954. Dalam rangka pembangunan nasional, partisipasi pekerja/buruh semakin meningkat dan pada saat yang sama perlindungan pekerja/buruh harus ditingkatkan dalam hal kesejahteraan, upah dan martabat manusia.

Perselisihan perburuhan yang terjadi antara pekerja/buruh dan pengelola perusahaan sering mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan[[3]](#footnote-3) meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada badan usaha, baik perbuatan badan hukum maupun bukan, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik sendiri, badan, baik swasta maupun publik, serta lembaga sosial, perusahaan, dan bisnins lain yang mengelola dan menggunakan orang dengan membayar gaji dan imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Hubungan industrial adalah interaksi yang terbentuk antara pelaku pada proses produksi dan/atau jasa yang terdiri berdasarkan pekerja/buruh, pengusaha, oleh karena itu pemerintah mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.”

Kabupaten Serang Provinsi Banten memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan yang didirikan, perkembangan industri di Kabupaten Serang dapat dikatakan sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi seiring perkembangannya persoalan yang terjadi juga semakin berkembang. Peningkatan kuantitas buruh yang sangat banyak ditambah dengan meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendaftar juga menjadi persoalan apabila kondisi perusahaan pada umumnya sedang berada dalam posisi kurang menguntungkan.

Salah satu bentuk rasa tanggung jawab yang dimiliki Pemerintah dalam mengatasi peliknya masalah pengangguran yang ada maka dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,[[4]](#footnote-4) salah satu tujuan Peraturan daerah tersebut adalah untuk mengurangi atau menanggulangi jumlah pengangguran, dalam Bab II mengenai Strategi Kebijakan yang dijelaskan dalam pasal 2 yaitu Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi : a. sebelum bekerja; b. selama bekerja; dan c. sesudah bekerja. Peraturan Daerah tersebut dibentuk atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2.

Pada masalah penanggulangan pengangguran tersebut Pemerintah Daerah fokus pada penyelengggaraan ketenagakerjaan sebelum bekerja dengan upaya yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmirasi Kabupaten Serang untuk menyikapi persoalan tersebut, di antaranya dengan mengintensifkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, upaya lainnya yang dilakukan Pemkab Serang dalam menyikapi permasalahan tingginya pengagguran ini adalah upaya sekolah-sekolah SMK yang harus mampu membaca peluang kerja. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam mengurangi atau menanggulangi pengangguran, Akan tetapi faktanya di lapangan tidak dengan demikian, hal ini berarti terdapat hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dibalik pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Serang, yang pertama terkait tujuan dan ukuran kebijakan. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Serang yang masih belum diberi pelatihan untuk bekal dalam memasuki dunia kerja, dan masih banyak program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Selanjutnya adalah Sumber daya, dalam hal ini ialah pelaksana tugas pokok dan fungsi bagian dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Serang belum berjalan baik karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi. Sehingga memicu perusahaan menggunakan mesin otomatis dan tidak memerlukan tenaga manusia lagi, hal ini bisa menambah jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Serang.

Permasalahan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah adalah letak BKK yang strategis, jumlah penduduk yang sangat banyak, sedikitnya lapangan pekerjaan, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, dan informasi mengenai lapangan pekerjaan yang tidak meluas. Sementara itu faktor eksternalnya adalah investasi asing yang meningkat membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja, letak industri yang strategis sehingga membuat para investor tertarik, persaingan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing, masuknya produk-produk luar negeri ke pasar lokal. Dari permasalahan dan faktor yang ada maka akan dihasilkan strategi dalam menanggulangi permasalahan pengangguran di Kabupaten Serang.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan penelitian sangat penting melihat dan membandingkan dengan penelitian sebelumya. Teori-teori atau temuan-temuan pada penelitian sebelumnya bisa dijadikan sebagai bahan acuan yang tepat. Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kabupaten Serang Provinsi Banten belum pernah ada sebelumnya, namun ada variable yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyda Nur Fauziyah dengan judul skripsi “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2010-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variable-variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada Pulau Jawa selama periode 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan alat pengolahan eviews 8. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyda dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbuka sangat berpengaruh terhadap kemiskinan dan harapnya pemerintah mampu memberikan solusi bagi masyarakat. *Output* yang diharapkan peneliti juga pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.[[5]](#footnote-5)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Farid Alghofari dengan judul skripsi “Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara jumlah penduduk, inflasi, upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap total pengangguran di Indonesia berdasarkan tahun 1980-2007. Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan studi yang diterapkan adalah metode analisis deskriptif. Penelitian oleh Farid Alghofari bertujuan untuk mengetahui hubungan jumlah penduduk, inflasi terhadap pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.[[6]](#footnote-6)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh pada jurnal dengan judul “Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia”. Jurnal ini berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, perlu ada pembahasan mengenai masalah-masalah yang menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pengangguran guna menaikkan dan meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi negara ini. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah masih banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia yang menyebabkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi rendah. *Output* dari hasil penelitian Ahmad Soleh adalah saran kepada Pemerintah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya manusia untuk dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja.[[7]](#footnote-7)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ani Hayati pada jurnal “Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau”. Pada jurnal ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kota dalam mengurangi pengangguran karena masih banyak ketidakseimbangan antara data dan fakta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau dalam mengurangi pengangguran perkotaan belum terlaksana karena kenaikan angka pengangguran yang terus meningkat di setiap tahunnya.[[8]](#footnote-8)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda pada jurnal “Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam Menanggulangi Pengangguran di Sangatta Kabupaten Kutai Timur”. Jurnal ini membahas tentang tolak ukur menurut kesejahteraan warga bisa dipandang menurut masyarakat yang memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya, permasalahan yang dibahas adalah pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang dapat diakses sehingga dapat mengarah kepada pengangguran. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis pada penelitian ini adalah pengurangan informasi yang didapat, kemudian informasi tersebut diurutkan, dan ditampilkan yang pada akhirnya menarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh sesuai dengan sumbernya. Secara umum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Timur sangat sempurna dalam menjalankan metodologinya, tepatnya dalam bentuk program yang diwujudkan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin dalam mengurangi tingkat komponen yang terdapat di Kutai Timur.[[9]](#footnote-9)

Penelitian yang dilakukan oleh Suhandi, Hendra Wijayanto dan Samsul Olde pada jurnal “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia”. Pada jurnal ini membahas masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah pengangguran harus dikurangi dengan membukia lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pembangunan keuangan negara. Menciptakan pasar tenaga kerja merupakan kunci kemudahan dalam berbisnis. Penerapan kebijakan di Indonesia selama ini belum menaruh kemudahan bagi swasta dan dunia dalam menjalankan usahanya. Jenis penelitian ini merupakan Studi Kasus *(Case Study)* dimana penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang mencakup orang, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mix method* menurut Creswell dan Cralk, yaitu sebuah mekanisme yang mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu pemikiran untuk mendapat kasus yang dipikirkan. Hasil akhir berdasarkan penelitian ini adalah permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu :

1. Menigkatkan kompetensi dan efisiensi tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
3. Membuat hubungan mekanis yang harmonis dan memperbaiki iklim usaha.
4. Meningkatkan jaminan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengawasan tenaga kerja[[10]](#footnote-10)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mellisa Mega Monita, Adam Idris, dan Anwar Alaydrus pada jurnal “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan pelaksanaan latihan-latihan aktualisasi pilihan tenaga kerja yang mencakup perencanaan, tindakan spesialis, perluasan pembukaan pekerjaan, dan pengarahan oleh divisi tenaga kerja. Kota Samarinda bekerja dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan strategi subjektif. Timbulnya pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pekerjaan dalam dunia perdagangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam pelaksanaannya telah berjalan dalam dunia yang sempurna karena orang-orang yang ada mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya.[[11]](#footnote-11)

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu mengenai ketenagakerjaan dan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Serang Provinsi Banten di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, metode yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung di Kabupaten Serang. Penanggulangan pengangguran menitikberatkan pada penyampaian informasi mengenai lowongan pekerjaan. Faktor yang menghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini yaitu faktor internal dan faktor ekternal, sehingga melalui faktor tersebut bisa memunculkan strategi dalam menanggulangi pengangguran yang ada, harapan akhir dari kebijakan tersebut adalah berkurangnya jumlah pengangguran dan masyarakat terutama para buruh bisa bekerja dengan nyaman dan memiliki kehidupan yang sejahtera.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam proses pengembangan daerah, mengeksplor faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan ketenagaekrjaan, dan Untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam menanggulangi permasalahan mengenai pengangguran.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu memecahkan dan menanggapi masalah dengan memahami dan mengeksplorasi secara mendalam objek yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi dan waktu.

Menurut Sugiyono, dalam pengumpulan data triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Triangulsi Sumber adalah untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.
2. Triangulasi Tenik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Selain itu peneliti secara bersamaan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.
3. Triangulasi Waktu, waktu yang digunakan mempengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh di pagi hari akan berbeda dengan yang diperoleh di malam hari, pada saat pagi hari informan/sumber data masih segar dan permasalahan yang terjadi belum kompleks.[[12]](#footnote-12)

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualtitatif, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Serang, Kepala Sub Bagian Umum dan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kabupaten Serang, serta Masyarakat pencari kerja dan pekerja. Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang sejak awal informan telah ditentukan sesuai dengan topik penelitian. Penentuan informan menngunakan fokus dan sampel. Teknik fokus berarti seseorang peneliti memutuskan mengajukan pertanyaan dan tema tertentu.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Impelementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kabupaten Serang**
3. **Tujuan dan Ukuran Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van Horn indikator pertama dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah menentukan ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang mana di dalamnya terdapat observasi, dokumentasi dan hasil wawancara bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 4 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran di Provinsi Banten sudah tepat dalam menentukan atau membuat sasaran, standar, ukuran dan tujuan kebijakan, karena tujuannya mudah di cerna oleh para implementor dalam hal ini dari perusahaan dan industri maupun dari pegawai di dinas tenaga kerja dan transmigrasi harapannya peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat secara luas.

Program-program yang telah disusun oleh dsnakertans dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kabupaten Serang adalah program wajib lapor informasi lowongan kerja yang dimiliki oleh perusahaan atau bisa juga diakses melalui aplikasi yang dimikili oleh disnakertrans kabupaten serang yaitu aplikasi “sikeras”.[[13]](#footnote-13)

Program selanjutnya adalah penempatan tenaga kerja yang dilakukan disnakertrans bukan hanya penempatan antar lokal di provinsi banten namun juga penempatan tenaga kerja antar daerah, penempatan tenaga kerja transmigrasi dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Program lainnya adalah program SDC (Skill Development Center) atau pelatihan berbasis kompetensi.[[14]](#footnote-14)

**Tabel 1**

**Data Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Kejuruan** | **Jumlah Peserta** | **Tempat** | **Sumber Anggaran** |
| 1 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | Menjahit | 16 | Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang | APBD |
| 2 | Teknisi Ahli | Las Listrik | 16 | BBPLK, Serang | APBD |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Berbasis Wirausaha | Menjahit | 20 | Desa Banyuwangi Kecamatan Pulo Ampel | APBD |
| 4 | Pelatihan Berbasis Kompetensi ke BBPLK Bekasi | Refrigation/AC Residental | 5 | BBPLK, Bekasi | APBN/ BBPLK |
| Tik/ Desainer Grafis Muda | 4 | BBPLK, Bekasi | APBN/ BBPLK |
| Elektronika/Teknisi HP | 3 | BBPLK, Bekasi | APBN/ BBPLK |
| Elektronika/ Embeded System | 3 | BBPLK, Bekasi | APBN/ BBPLK |
| Elektronika/ Komunikasi | 3 | BBPLK, Bekasi | APBN/ BBPLK |
| 5 | Pelatihan dari STPI | Las | 90 | Ponpes Al-Fauzan Kp. Panyuangan Jaya Kec. Ciomas | APBN/ STPI |
| 6 | Pelatihan dari LPM | Las | 10 | Desa Karang Kepuh Kecamatan Bojonegara | DESA |
| 7 | Pelatihan Budidaya Ikan Koi | Budidaya Ikan Koi | 16 | Desa Suka Cai Kecamatan Baros | APBN/ BBPLK |
| 8 | Pelatihan Budidaya Hidroponik | Sayuran Hidroponik | 16 | Desa Suka Cai Kecamatan Baros | APBN/ BBPLK |
| 9 | Teknisi Ahli | Las Listrik | 16 | BBPLK, Serang | APBD |
| **Jumlah** | | | **218** |  |  |

Sumber : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah berupaya untuk selalu melakukan pelatihan guna mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan bias menambah jumlah pendapatan daerah apabila barang yang diproduksi bias laku di pasaran.

1. **Sumber Daya**

Van Metter dan Van Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan *(policy resouces)* tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Adapun hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kabupaten Serang terkait dengan sumber daya manusia yakni dilihat dari kualitas dan kuantitas petugas pelaksana kebijakan yaitu pegawai yang ada di lingkungan disnakertrans kabupaten serang, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **BANYAKNYA (ORANG)** |
| 1 | Strata 2 | 12 |
| 2 | Strata 1 | 20 |
| 3 | Diploma III | 0 |
| 4 | SLTA | 2 |
|  | **JUMLAH** | **34** |

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakertrans Kabupaten Serang, 2022

Berdasarkan jumlah ASN diatas, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan tentang ketenagakerjaan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, yaitu pamahaman dari masing-masing individu mengenai penanggulangan pengangguran. Semakin tinggi jenjang pendidikannya maka akan semakin paham para pelaku kebijakan tersebut dalam menanggulangi permasalahan yang ada.

**Tabel 3**

**Kondisi Kepegawaian Disnakertrans Kabupaten Serang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **STATUS KEPEGAWAIAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 34 Orang |
| 2 | Pramubakti, Pengemudi, Office Boy, Keamanan | 16 Orang |
|  | **TOTAL** | **50 Orang** |

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakertrans Kabupaten Serang, 2022

Dari jumlah aparatur sipil negara dan kondisi kepegawaian yang ada di lingkungan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang, sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran di kabupaten serang adalah semua pegawai yang ada disana, namun memang ada yang bersinggungan langsung dan tidak langsung terhadap implementasi peraturan daerah tersebut.

1. **Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Aktifitas Pelaksana**

Dalam implementasi Peraturan daerah tersebut peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Serang dalam melaksanakan suatu kebijakan, karena hakikatnya Peraturan Daerah Provinsi adalah salah satu jenis kebijakan yang mana harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang ada di Bawahnya dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.[[15]](#footnote-15) Adapun data yang di dapatkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**

**Laporan Pencari Kerja Kabupaten Serang 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 1 | Januari | 1233 | 1070 | 2303 |
| 2 | Februari | 1055 | 1053 | 2108 |
| 3 | Maret | 1258 | 1186 | 2444 |
| 4 | April | 794 | 858 | 1652 |
| 5 | Mei | 613 | 766 | 1379 |
| 6 | Juni | 1424 | 1766 | 3190 |
| 7 | Juli | 330 | 405 | 735 |
| 8 | Agustus | 568 | 623 | 1191 |
| 9 | September | 649 | 583 | 1232 |
| 10 | Oktober | 705 | 643 | 1348 |
| 11 | November | 896 | 590 | 1486 |
| 12 | Desember | 930 | 927 | 1857 |
|  | **Total** | **10455** | **10470** | **20925** |

Sumber : Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang, 2022

Berdasarkan data tersebut jumlah pencari kerja di Kabupaten Serang naik dan turun setiap bulannya pada tahun 2021, namun semua jumlah pelamar tersebut diseleksi dan diberikan pelatihan dari Dinas Temaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk mendapatkan dasar-dasar yang harus dilakukan pada saat ditempatkan di perusahaan supaya bisa menyesuaikan dengan para pekerja disana. Keterampilan yang diberikan sesuai dengan perusahaan yang dituju oleh para pelamar pekerjaan tersebut.

**Tabel 5**

**Laporan Penempatan Kerja Kabupaten Serang Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 1 | Januari | 57 | 114 | 171 |
| 2 | Februari | 717 | 269 | 986 |
| 3 | Maret | 336 | 794 | 1130 |
| 4 | April | 253 | 693 | 946 |
| 5 | Mei | 107 | 343 | 450 |
| 6 | Juni | 52 | 372 | 424 |
| 7 | Juli | 31 | 338 | 369 |
| 8 | Agustus | 42 | 62 | 104 |
| 9 | September | 157 | 20 | 177 |
| 10 | Oktober | 177 | 12 | 189 |
| 11 | November | 185 | 282 | 467 |
| 12 | Desember | 958 | 360 | 1318 |
|  | **Total** | **3072** | **3659** | **6731** |

Sumber : Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang,2022

Berdasarkan data diatas dan menurut hasil penelitian, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Serang baru melaksanakan peraturan penyampaian laporan penempatan tenaga kerja, belum menegakkan peraturan mengenai penyampaian informasi lowongan kerja. Hal ini disebabkan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang tidak memaksakan kepada perusahaan/ industri yang ada di kabupaten serang untuk melaporkan informasi lowongan pekerjaan, yang dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang tekankan adalah memang hanya pada pelaporan penempatan kerja.

Padahal menurut keterangan dari masyarakat/pengangguran atau pencari kerja bahwa di daerah modern cikande tepatnya adalah daerah pusat perusahaan dan industri di kabupaten serang banyak permasalahan dalam penempatan tenaga kerja yaitu terdapat calo atau pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan meminta pungutan biaya kepada para pencari kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan dan perusahaan juga mendapat tekanan dari masyarakat daerah cikande tersebut untuk dapat menerima tenaga kerja dari warga sekitar cikande dan tambak sebelum menerima tenaga kerja dari masyarakat luar dari daerah tersebut.

1. **Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana**

Karakteristik badan atau instansi pelaksana menurut van metter dan van horn adalah menyangkut struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang oleh badan eksekutif dalam menjalankan kebijakan.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan di tuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

1. **Sikap Para Pelaksana**

Menurut Van metter dan van horn sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan impelementasi kebijakan publik.[[16]](#footnote-16) Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik bisa bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadinya. Van metter dan van horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan *(befiltered)* lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan *(cognition),* pemahaman dan pendalaman *(comprehension and understanding)* terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak *(acceptance, neutrality, dan rejection).* Dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika pada pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *“crucial”.* Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.[[17]](#footnote-17)

1. **Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Pada model implementasi kebijakan van metter dan van horn faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi salah satu faktor yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan, karena faktor ini dapat menunjang pelaksanaan dan mempengaruhi badan pelaksana.

Dalam indikator ini juga van metter dan van horn menjelaskan bahwa sejauh mana sumberdaya ekonomi masyarakat, kelompok kepentingan dan karateristik para elit politik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dalam penelitian kali ini yakni mengenai implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran di kabupaten serang.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi perda tersebut juga adalah belum adanya kesadaran dari tiap stakeholders yaitu dari masyarakat maupun perusahaan, dan juga pemerintah yang tidak berdaya karena pemerintah bekerja untuk masyarakat itu sendiri. Jika bagian pengawasan menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apalagi sampai mengeluarkan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin maka yang akan terkena imbasnya masyarakat serang khususnya yang terkena PHK yang akan menambah jumlah pengangguran.[[18]](#footnote-18)

Tantangan pengangguran kedepannya bukan hanya bersaing dengan manusia lainnya namun akan bersaing dengan robotik yang canggih sehingga terdapat pergeseran ketenagakerjaan, maka dari itu kabupaten/kota di provinsi banten harus memilki balai latihan kerjanya masing-masing agar kemampuan dan skill tenaga kerja meningkat. Apalagi yang memilki pengangguran tinggi seperti kabupaten serang maka wajib hukumnya memiliki BLK walaupun saat ini di kabupaten serang belum memilki BLK.

Keadaan sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi peraturan daerah provinsi banten nomor 4 tahun 2016 ini sangat kompleks. Berdasarkan hasil penelitian, dari pihak pemerintah dalam menanggulangi pengangguran ini yang harus sangat di benahi adalah sektor pendidikan karena pendidikanlah yang membuka wawasan cakrawala masyarakat untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan namun di sisi masyarakat itu sendiri ada yang masih memiliki pola fikir bahwa ia merasa merugi ketika ia telah bersekolah setinggi-tingginya namun untuk mendapatkan pekerjaan yang layak masih harus mengeluarkan biaya.[[19]](#footnote-19)

1. **Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Kabupaten Serang**
2. **Faktor Internal**
3. Letak Balai Kerja Khusus (BKK) yang strategis dan terdapat di setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kabupaten Serang. Dengan adanya BKK tersebut pemerintah kabupaten mengharapkan siswa-siswa SMK sudah mempunyai keahlian yang mumpuni untuk dapat ditempatkan di perusahaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
4. Jumlah penduduk yang sangat banyak bisa menyebabkan tingginya jumlah pengangguran yang ada.
5. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, jumlah lapangan kerja yang ada dengan jumlah pelamar kerja tidak sebanding, sehingga masyarakat diharapkan mampu membuat usaha-usaha mandiri untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Serang.
6. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Serang. Hal tersebut bisa diatasi dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk mempersiapkan para pencari kerja memasuki dunia pekerjaan.[[20]](#footnote-20)
7. Kurang informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Biasanya perusahaan memberikan informasi mengenai lapangan pekerjaan secara tertutup dan tidak meluas, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya lowongan pekerjaan. Dilihat dari hasil observasi di daerah industri Cikande, banyak para pekerja yang berasal dari pribumi sehingga hanya mementingkan orang asli daerahnya saja.
8. **Faktor Eksternal**
9. Investasi asing yang meningkat membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja. Para investor sangat tertarik dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Serang, hal ini dibuktikan dengan adanya pusat industry yang berlokasi di Kecamatan Cikande. Disitu terdapat berbagai jenis perusahaan yang hasil produksinya di pasarkan di dalam dan luar negeri, hal tersebut tentu membuat bangga kabupaten dan menambah jumlah pendapatan daerah.[[21]](#footnote-21)
10. Letak industri yang strategis sehingga membuat para investor tertarik. Letak perusahaan yang dekat dengan Ibukota Jakarta juga mempengaruhi para investor. Kabupaten Serang yang memiliki banyak perusahaan dan letaknya berdekatan dengan ibukota sangat mempengaruhi jumlah investasi yang diberikan oleh para investor.[[22]](#footnote-22)
11. Persaingan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang kurang baik, perseteruan yang biasa terjadi antar pegawai menyababkan buruknya hubungan antar pegawai dalam suatu perusahaan. Hal ini tentu harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam menghadapi ancaman yang dimiliki oleh setiap perusahaan.
12. Masuknya produk-produk luar negeri ke pasar lokal. Pembatasan produk luar negeri tentu harus dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut guna melestarikan produk buatan dalam negeri. Untuk itu produk buatan dalam negeri juga harus ditingkatkan kualitasnya supaya bisa menarik pembeli dan masyarakat.
13. **Strategi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Masalah Pengangguran di Kabupaten Serang**

Menurut Rangkuti Analisis SWOT adalah identifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Untuk mencapai misi, tujuan, sasaran serta kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan, manajemen perlu memperhatikan dua faktor pokok yaitu faktor internal yang sepenuhnya berada di dalam kendali manajemen (perusahaan) dan faktor eksternal yang tidak dapat di kontrol atau berada di luar bidang manajemen. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses) dengan faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Matrik SWOT dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis, dimana setiap hubungan tersebut diberikan solusi strategis yang harus dilakukan.[[23]](#footnote-23)

Sebagaimana sebuah metode pada umumnya, analisa SWOT ini hanya dapat membantu menganalisa situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau sebuah organisasi. Dan metode ini bukan sebuah jawaban pasti yang mampu memberikan solusi pada tiap masalah yang sedang dihadapi, namun minimal akan memecah persoalan yang ada dengan mengurainya menjadi bagian bagian kecil yang akan lebih tampak sederhana.

Selanjutnya untuk penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dilakukan analisa dengan menggunakan SWOT analisis sebagai berikut :

**Tabel 6**

**Matriks Analisis SWOT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Faktor-Faktor Internal** | **Kekuatan (S)**   1. Letak BKK yang strategis 2. Besarnya jumlah penduduk | **Kelemahan (W)**   1. Tingginya migrasi tenaga kerja 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 3. Masih sulitnya masyarakat daerah untuk mendapat pekerjaan |
| **Faktor-Faktor Eksternal** |
| **Peluang (O)**   1. Investasi asing yang meningkat membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja 2. Letak industri yang strategis sehingga membuat para investor tertarik | **Strategi (SO)**   1. Melakukan pelatihan dengan bantuan investasi dari luar negeri 2. Membangun perusahaan baru untuk menyerap tenaga kerja | **Strategi (WO)**   1. Menaikkan gaji/pesangon pekerja untuk menghindari migrasi tenaga kerja 2. Pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan secara berkala |
| **Ancaman (T)**   1. Persaingan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing 2. Masuknya produk-produk luar negeri ke pasar lokal | **Strategi (ST)**   1. Memaksimalkan BKK untuk menekan tenaga kerja asing 2. Penduduk hanya boleh membeli barang hasil produksi dalam negeri | **Strategi (WT)**   1. Pemerataan tenaga kerja di setiap daerah 2. Pembatasan masuknya produk luar negeri |

Sumber : Rangkuti, diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan matriks diatas, dapat diketahui bahwa setiap kebijakan tentu ada kelebihan dan kekurangan dalam pengimplementasiannya kepada sasaran kebijakan. Analaisis diatas membantu mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan ketenagakerjaan dalam meannggulangi pengangguran di Kabupaten Serang. Strategi yang ditemukan oleh peneliti setelah analisis hasil dan pembahasan adalah pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang bisa memaksimalkan pelatihan kepada tenaga kerja terdidik dengan bantuan investasi dari luar negeri sehingga menambah kompetensi para pencari kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Serang.

1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penyelenggaraan ketenagakerjaan tentu memerlukan banyak sekali stakeholder, baik itu dari pihak tenaga kerja maupun dari pihak perusahaan yang menyediakan lapangan perkerjaan. Dalam pelaksanaannya tentu ditemukan berbagai penghambat dalam proses penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Serang. Banyak faktor yang menyebabkan para pekerja/buruh tidak mendapatkan hak-haknya sebagai buruh, diantaranya adalah karena kurangnya hubungan baik antara buruh/pekerja dengan pemberi kerja/pengusaha/perusahaan atau yang biasa disebut dengan perselisihan perburuhan. Hubungan yang baik antara buruh dengan pemberi kerja adalah dapat berupa hubungan subordinasi, artinya antara pekerja dan manajer memiliki kedudukan yang berbeda-beda, dimana salah satu pihak akan menyumbangkan suatu pengaturan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan substansi perjanjian kerja dengan mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakan. Hubungan yang kurang baik sering ditemukan antara pihak pemberi kerja dan para buruh, karena faktor-faktor tertentu, perkembangan dalam dunia usaha sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi industri terutama peran para pemangku kepentingan dalam bisnis, semakin baik hubungan industrial, semakin banyak peristiwa penting dalam dunia bisnis.

Kabupaten Serang Provinsi Banten memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan yang didirikan, perkembangan industri di Kabupaten Serang dapat dikatakan sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi seiring perkembangannya persoalan yang terjadi juga semakin berkembang. Peningkatan kuantitas buruh yang sangat banyak ditambah dengan meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendaftar juga menjadi persoalan apabila kondisi perusahaan pada umumnya sedang berada dalam posisi kurang menguntungkan.

Dengan adanya kebijakan mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan ini diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaetn Serang, sehingga masyarakat bisa hidup dengan baik karena adanya pekerjaan yang dilakukan.

1. **Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat terhadap implementasi penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Serang, dimana permasalahan calo dalam mencari pekerjaan menjadi masalah yang titik temu nya susah untuk diselesaikan karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat di lingkungan indiustri seperti Kabupaten Serang.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis peneliti yang dilandaskan teori mengenai implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, ternyata ada beberapa faktor dari aspek yang dikemukakan tersebut belum terpenuhi dalam proses fasilitasi penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Proses implementasi kebijakan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran memerlukankan proses yang cukup lama dan sangat kompleks. Strategi yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan bisa membantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menanggulangi permasalahan pengangguran yang ada di Kabupaten Serang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Metter dan Van Horn.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Bupati dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Alghofari, Farid, and Arif Pujiyono. “Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007.” Universitas Diponegoro, 2011.

DINAS TENAGA, KERJA KOTA SAMARINDA DI. “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG TENAGA KERJA,” 2018.

Fauzi, Achmad. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36.

Fauziyah, Rosyda Nur. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015,” 2018.

Freddy, Rangkuti. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis : Cara Perhitungan Bobot, Rating Dan OCAI*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Huda, Nurul. “STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR,” 2016.

PAsira, Fisip, and Ani Hayati. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENGURANGI PENGANGGURAN PERKOTAAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA LUBUKLINGGAU.” *Jurnal PAsira* 4, no. 1 (2021): 7–19.

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (2016).

Rasyid, Ryaas. *Pemerintahan Yang Amanah*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1998.

Soleh, Ahmad. “Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 2 (2017): 83–92.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet.26. Bandung: Alfabeta, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).

Wijayanto, Hendra, and Samsul Olde. “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 13, no. 1 (2020): 85–94.

1. Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik,” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ryaas Rasyid, Pemerintahan Yang Amanah (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1998), Hlm.59. [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (2003). [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Daerah, “Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan” (2016). [↑](#footnote-ref-4)
5. Rosyda Nur Fauziyah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015,” 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Farid Alghofari and Arif Pujiyono, “Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007” (Universitas Diponegoro, 2011). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Soleh, “Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 2 (2017): 83–92. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fisip PAsira and Ani Hayati, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENGURANGI PENGANGGURAN PERKOTAAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA LUBUKLINGGAU,” *Jurnal PAsira* 4, no. 1 (2021): 7–19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nurul Huda, “STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR,” 2016. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hendra Wijayanto and Samsul Olde, “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 13, no. 1 (2020): 85–94. [↑](#footnote-ref-10)
11. KERJA KOTA SAMARINDA DI DINAS TENAGA, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG TENAGA KERJA,” 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet.26 (Bandung: Alfabeta, 2017). [↑](#footnote-ref-12)
13. Wawancara dengan Dr. Rachmat Maulana, M.Si, Selaku Plt. Kepada Disnakertrans Kabupaten Serang, pada tanggal 12 Januari 2022 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Winarno, 2012 [↑](#footnote-ref-16)
17. Van Metter dan Van Horn, 1974 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan H. Ugun, SP, ST, M.Si, Selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, pada tanggal 7 Januari 2022 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara dengan Dr. Rachmat Maulana, M.Si, Selaku Plt. Kepada Disnakertrans Kabupaten Serang, pada tanggal 12 Januari 2022 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
23. Rangkuti Freddy, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis : Cara Perhitungan Bobot, Rating Dan OCAI* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016). [↑](#footnote-ref-23)